

WALIKOTA SUKABUMI
CERAMAH KEPADA PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN
TK.II ANGKATAN XXVI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pengantar :

Pada tanggal 1 Juli 2009 Walikota Sukabumi (H. Mokh Muslikh Abdussyukur, SH.,M.Si) Telah diundang untuk memberikan ceramah dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVI PKP2A I LAN di Bandung.

Mengingat tidak semua kepala daerah mendapat kesempatan yang sama, tentunya hal ini merupakan suatu penghargaan, respon positif dan apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara atas kompetensi, pengalaman dan kinerja Walikota Sukabumi.

Di hadapan 115 peserta, para pejabat dari pusat (Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian dls) dan pejabat daerah seluruh Indonesia, Walikota Sukabumi menyampaikan ceramah tentang Best Practice Kepemimpinan. Materi yang cukup menarik, hal ini ditandai oleh besarnya respons peserta dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan terlibat diskusi yang hangat.

Pointer Materi :

Tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adapun tujuan Nasional sebagaimana tercermin dalam Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 dalam mewujudkan Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, yang dijabarkan lebih lanjut kedalam 8 Misi.

Salah satu langkah penting utamanya seiring penyelenggaraan otonomi Daerah yang berkualitas diperlukan kesiapan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan mengaplikasikan *Scientific government*. Demikian pula daerah harus mampu berkreasi dan berprakarsa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara proposional, terutama dalam mengelola sebagai potensi sumber daya lokal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Di era otonomi daerah, pimpinan daerah seperti bupati/walikota harus mampu meng-*empowering* seluruh staff, *stakeholder* dan masyarakatnya untuk menggali berbagai inisiatif, kreatifitas dan inovasi dalam batas kewenangan yang dimiliki dalam menciptakan masyarakat sejahtera, yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Cukup banyak praktik-praktik inovasi atau *best practice* dari kabupaten atau kota di era otonomi daerah yang berhasil meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara lebih berkualitas kepemimpinan dari pimpinan daerah.

Pemimpin adalah seorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manajer) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Pimpinan atau manajer hanya ada dalam konteks organisasi, sedangkan fenomena kepemimpinan bersifat lebih luas – dapat dalam konteks organisasi maupun non organisasi seperti ulama, tokoh masyarakat yang dihormati dls.

Dalam lingkup publik/pemerintahan, pimpinan dikenal dengan sebutan “pejabat” yaitu seseorang yang diangkat untuk menduduki/memangku suatu jabatan, pimpinan organisasi menjalankan manajemen tetapi tidak secara otomatis merupakan pimpinan. Maka diharapkan, bagi yang menduduki jabatan structural tidak hanya mampu

menjalankan manajemen dengan efektif, tetapi sekaligus menjadi pimpinan yang menjalankan kepemimpinan secara efektif sesuai dengan tingkatan dan cakupan, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

Di era reformasi dengan proses demokrasi yang semakin terbuka di Negara kita, saat ini siapapun bias jadi pimpinan pemerintah daerah tanpa harus melalui *tour of duty* yang cukup panjang sebagaimana waktu sebelumnya. Sebagai contoh, dulu untuk menduduki jabatan bupati/walikota seseorang biasanya setelah menduduki berbagai jabatan formal dalam pemerintahan, selain ada penilaian-penilaian lain menyangkut kepemimpinan, akhlak dan *acceptable*.

Indonesia saat ini sangat merindukan pemimpin politik yang memiliki visi, kompetensi dan *compassionate* untuk memajukan bangsanya. Indonesia memerlukan suri tauladan kepemimpinan yang meyakini bahwa jabatan adalah tanggungjawab dunia akhirat dan bukan kemegahan serta peluang (*opportunity*) untuk menambah kekayaan semata dengan apapun caranya.

Beberapa praktik inovasi yang menjadi *best practice* Kota Sukabumi dan beberapa diantaranya telah dimuat dalam Buku Best Practice Kota-kota adalah :

1. Regrouping Sekolah Dasar (Sudah 13 Tahap)
2. Kartu Bebas Biaya Sekolah
3. Program Penuntasan Rehabilitasi Gedung Sekolah
4. Program Peningkatan Standar Mutu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamsudin,SH melalui Sertifikasi ISO.
5. Program Peningkatan Kapasitas Puskesmas
6. Program Komposting TPSA Terintegrasi Dengan Penggemukan Sapi dan Padi Organik.

Penyunting,

Gabril M.Sukarman